

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor keuangan di Indonesia adalah salah satu sektor yang berperan dalam mendukung perkembangan perekonomian nasional. Perkembangan sektor keuangan syariah didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No 7 tahun 1992, yang mengatur tentang peraturan yang membolehkan setiap bank konvensional membuka sistem pelayanan syariah di cabangnya (dual banking sistem). Dampak positif dari dikeluarkannya undang-undang tersebut yaitu mulai munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Terdapat dua jenis lembaga keuangan syariah di Indonesia diantaranya lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank diantaranya yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sedangkan lembaga keuangan bukan bank diantaranya berupa Koperasi syariah (Baitul Maal Wa Tamwil), Asuransi Syariah (AS), dan Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS).

Berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak lepas dari fungsi utamanya yaitu sebagai lembaga intermediasi atau lembaga perantara pihak yang memiliki dana lebih yang kemudian dana tersebut disalurkan berupa pinjaman kepada pihak kedua sehingga dapat mendukung

usahanya. Namun pada kenyataannya Bank Umum Syariah (BUS) banyak yang belum bisa menjangkau dan membantu Unit Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Padahal pada lapisan inilah yang banyak menyumbangkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Kenyataan yang terjadi di lapangan membuktikan bahwa beberapa layanan pembiayaan dengan menggunakan pendekatan perbankan sulit dilakukan dan tidak menjangkau UMKM. Hal ini disebabkan adanya faktor yang membatasi hubungan UMKM dengan perbankan, yaitu masalah agunan dan formalitas sebagaimana dikutip oleh Suhendi (2004). Namun demikian, saat ini telah ada lembaga keuangan syariah yang berpihak pada pengusaha mikro yaitu Koperasi Syariah salah satu contohnya yaitu Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).

Menurut Ridwan (2004), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang tidak saja berorientasi bisnis dan ekonomi tetapi juga sosial. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) juga tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang. Oleh karena itu berdirinya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) harus didukung dan dikembangkan secara terus menerus. Selain konsep kerja yang baik dan berkah, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) menjadikan Unit Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dan masyarakat ekonomi lemah menjadi sasarannya. Gampito (2008) menyatakan bahwa ditengah mulai berkembangnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia ternyata di beberapa daerah di Indonesia keberadaan BMT dengan jumlah yang signifikan ini belum

banyak didukung dengan manajemen yang profesional yang memungkinkan BMT bertahan dan berjalan dengan baik.

Dikutip dari Santoso (2003), beliau juga menyatakan bahwa fakta di lapangan memperlihatkan banyaknya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang bubar dikarenakan kurangnya manajemen profesional dan kinerja keuangan serta citra kepercayaan yang menurun sehingga mitra banyak melakukan penarikan dana. Penarikan dana secara besar dan berkurangnya Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh sangat signifikan terhadap tingkat hasil atau *output* Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) itu sendiri. Penyebab tidak bertahannya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) selain kurangnya manajemen yang profesional, yaitu tidak efisiennya kinerja keuangan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sehingga profit atau target yang dicapai tidak optimal.

Menurut Ascarya (2005), efisiensi adalah jumlah perbandingan antara suatu yang digunakan atau *input* untuk menghasilkan suatu *output* tertentu. Oleh karena itu semakin kecil biaya produksi untuk menghasilkan *output* tertentu dengan tingkat teknologi yang umum digunakan, maka semakin efisien pula kinerja keuangan perusahaan tersebut. Efisiensi merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah entitas bisnis. Nurhandini (2006), juga menyatakan bahwa konsep efisiensi sering didefinisikan sebagai melakukan sesuatu secara benar (*doing the right thing*). Hal ini biasanya sering dikaitkan dengan bagaimana cara perusahaan dalam mencapai target dan tujuannya. Oleh sebab itu, konsep efisiensi seringkali dilihat dari sisi biaya. Apabila seseorang memiliki perusahaan maka ia akan

mencoba menekan biaya sampai pada level seminimal mungkin untuk menghasilkan tingkat *output* yang diinginkan atau sesuai dengan target dalam proses transformasi dari *input* menjadi *output*.

Input yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Biaya operasional Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Dana Pihak Ketiga (DPK) diambil sebagai *input* karena DPK merupakan sumber dana utama Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang diperoleh dari kegiatan operasional pembiayaan dengan mitra. Pengelolaan yang baik dan tepat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan biaya operasional menjadi kriteria utama tercapainya efisiensi kinerja keuangan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

Tingkat efisiensi kinerja keuangan perlu diukur agar Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) memiliki parameter kerja yang baik. Pengukuran tingkat efisiensi yang paling tepat dapat menggunakan metode analisis statistik dengan pendekatan non parametrik yaitu *Data Envelopment Analysis (DEA)* versi 2.1. Pengukuran tingkat efisiensi ini dapat mengidentifikasi apa saja penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat di ambil adalah:

1. Bagaimana tingkat efisiensi kinerja keuangan Koperasi Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat efisiensi Koperasi Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
2. Untuk mengetahui bagaimana potensi pengembangan kinerja keuangan di Koperasi Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi akademisi, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber wawasan baru dan dapat menjadi pembanding serta referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi Koperasi Syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa masukan dalam mengelola kinerja keuangannya sehingga kinerja keuangan Koperasi Syariah menjadi lebih efisien.
3. Bagi pembaca, penelitian ini bisa menambah wawasan mengenai bagaimana tingkat efisiensi dan faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi kinerja Koperasi Syariah yang ada di Yogyakarta.